

ANALISIS VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PPN DAN PPNBM DI INDONESIA: STUDI PADA PDB, INFLASI, DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

Sirilus Alfredo Pangka¹, Risanda Alirastra Budianto²

^{1,2} Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : alfredopangka@students.unnes.ac.id, risanda.abe@mail.unnes.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received:

July 10, 2025

Revised

July 22, 025

Accepted:

July 23, 2025

Online available:

July 28, 2025

Keywords: GDP, Household Consumption, Inflation, Multiple Linear Regression, VAT and LGST.

Correspondence:

Nama: Sirilus Alfredo Pangka

E-mail:

alfredopangka@students.unnes.ac.id

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Centre for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: The purpose of this research is to analyze the impact of macroeconomic factors (GDP, Inflation, Household Consumption) on VAT and luxury tax revenues in Indonesia.

Methods: The research method uses a quantitative approach with secondary data from 2014–2023 from BPS, the Ministry of Finance, and Bank Indonesia. The analysis tool in the form of multiple linear regression in EViews 12.

Results: The classical assumption test (normality, autocorrelation, multicollinearity, heteroscedasticity) shows satisfactory results. The regression results revealed: GDP has a significant positive effect (significance 0.0005), Inflation is not significant (significance 0.5076), Household Consumption has a significant positive effect (significance 0.0000), and the model is significant simultaneously (F-statistic 160.77). The coefficient of determination (Adjusted R^2) is 95.6%. This research is expected to serve as the basis for fiscal policy to increase tax revenue through strengthening economic growth and public purchasing power, as well as to encourage further research with tax policy variables and long-term dynamic analysis.

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran sentral dalam pembiayaan pembangunan nasional dan menjaga stabilitas fiskal suatu negara. Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah, yang digunakan untuk membiayai belanja negara, infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial. Menurut (Musgrave, 1959) pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penghimpun dana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk mengatur alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan secara adil. Lebih lanjut, (Mardiasmo, 2016) menyatakan bahwa perpajakan merupakan pilar utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend), serta dapat memengaruhi perilaku konsumsi, investasi, dan tabungan masyarakat. Salah satu komponen terbesar dalam struktur penerimaan perpajakan Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kedua jenis pajak ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, tetapi juga mencerminkan dinamika ekonomi domestik, karena penerimanya sangat dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi, produksi, dan perdagangan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), kontribusi PPN dan PPnBM terhadap total penerimaan pajak mencapai rata-rata 30-35% dalam lima tahun terakhir. PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang/jasa, sedangkan PPnBM merupakan pajak tambahan yang dikenakan pada barang-barang mewah, baik produksi dalam negeri maupun impor. Menurut (Tanzi & Zee, 2000) efektivitas penerimaan pajak konsumsi sangat bergantung pada kondisi makroekonomi, struktur konsumsi masyarakat, serta efisiensi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, fluktuasi penerimaan kedua pajak ini sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat konsumsi masyarakat. Dengan demikian, fluktuasi penerimaan kedua pajak ini sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat konsumsi masyarakat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami volatilitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, seperti gejolak ekonomi global, pandemi COVID-19, serta perubahan kebijakan fiskal. Misalnya, selama krisis ekonomi 2020, penerimaan PPN mengalami penurunan akibat kontraksi konsumsi rumah tangga dan lesunya sektor bisnis (Bank Indonesia, 2021). Di sisi lain, PPnBM juga menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan daya beli masyarakat dan kebijakan impor. Oleh karena itu, memahami determinan makroekonomi yang memengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM menjadi sangat penting bagi perumusan kebijakan fiskal yang efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara variabel makroekonomi dan penerimaan pajak, khususnya PPN dan PPnBM. Studi oleh (Oktaviani et al., 2024) menemukan bahwa pertumbuhan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, karena aktivitas ekonomi yang tinggi mendorong transaksi yang menjadi objek PPN. Temuan ini didukung oleh teori pajak konsumsi yang menyatakan bahwa PPN bersifat pro-cyclical, artinya penerimanya cenderung meningkat ketika perekonomian tumbuh pesat.

Di sisi lain, (Kharisma & Furqon, 2023) mengungkapkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif terhadap PPnBM, karena kenaikan harga umum dapat mengurangi permintaan barang mewah, terutama bagi kelompok masyarakat dengan elastisitas pendapatan tinggi. Penelitian ini sejalan dengan studi (Ahmad et al., 2023) yang menemukan bahwa depresiasi nilai tukar (rupiah melemah) dapat meningkatkan beban PPnBM atas barang mewah impor, sehingga berpotensi menurunkan permintaan dan penerimaan pajaknya.

Sementara itu, (Budiman, 2025) menekankan peran konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama penerimaan PPN, karena mayoritas basis pengenaan PPN berasal dari belanja konsumen. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa investasi dan kebijakan tarif pajak turut memengaruhi elastisitas penerimaan PPN dan PPnBM. Temuan ini diperkuat oleh (Sari & Handoyo, 2021), yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak selama pandemi (seperti tax holiday dan pengurangan tarif PPnBM) berdampak pada penurunan sementara penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi (pertumbuhan PDB, inflasi dan konsumsi rumah tangga) terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia menggunakan analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik dalam EViews 12, guna memberikan bukti empiris yang valid dan terukur. Urgensi penelitian ini muncul dari tiga aspek kritis: Pertama, kontribusi vital PPN dan PPnBM (30-35% penerimaan pajak) yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, terutama pasca pandemi dan ketidakstabilan global. Kedua, kebutuhan analisis terkini dengan alat analisis yaitu EViews 12 untuk menguji hubungan kausal antar variabel, termasuk uji

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang belum banyak dilakukan dalam studi-studi sebelumnya. Ketiga, pentingnya rekomendasi berbasis data kuantitatif untuk kebijakan fiskal, khususnya dalam mengoptimalkan basis pajak konsumsi di tengah transformasi ekonomi digital yang mengubah pola transaksi. Dengan pendekatan kuantitatif melalui EViews 12, penelitian ini tidak hanya memvalidasi teori ekonomi pajak secara statistik, tetapi juga menyediakan peta jalan kebijakan yang presisi bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan PPN/PPnBM di era volatilitas ekonomi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan keterbaharuan dibandingkan penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek penting. Penelitian-penelitian terdahulu seperti oleh (Oktaviani et al. 2024), (Kharisma & Furqon, 2023), serta (Adi, 2020) cenderung membahas pengaruh variabel makroekonomi tertentu terhadap PPN atau PPnBM secara terpisah dan dalam rentang waktu terbatas, serta tanpa integrasi yang komprehensif dari ketiga variabel utama sekaligus (PDB, inflasi, konsumsi rumah tangga). Keterbaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan simultan terhadap ketiga variabel makroekonomi utama dan analisisnya terhadap dampak kolektif terhadap penerimaan PPN dan PPnBM dalam satu model regresi linier berganda dengan dukungan uji asumsi klasik yang lengkap (autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas) menggunakan perangkat lunak EViews 12. Selain itu, penelitian ini mengolah data selama periode 2002–2024 sehingga menawarkan cakupan waktu yang lebih panjang dan relevan secara kontekstual, terutama pasca-pandemi dan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas ruang lingkup empiris, tetapi juga menyumbangkan dasar kebijakan fiskal yang lebih aktual dan aplikatif bagi optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut; (1) Bagaiman pengaruh PDB terhadap penerimaan PPN dan PPnBM?, (2) Apakah Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM?, (3) Sejauh apa Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM?.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai determinan makroekonomi terhadap penerimaan pajak konsumsi telah menjadi perhatian penting dalam literatur ekonomi fiskal dalam lima tahun terakhir. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan makroekonomi fiskal modern yang menekankan bahwa variabel-variabel seperti Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan konsumsi rumah tangga berperan signifikan dalam menentukan penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Budiman, 2025). Dalam konteks ini, PDB dipandang sebagai indikator utama aktivitas ekonomi. Peningkatan PDB akan meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya memperluas basis pemajakan barang dan jasa, sebagaimana dijelaskan oleh (Oktaviani et al., 2024) yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara PDB terhadap penerimaan PPN di Indonesia.

Sementara itu, pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak konsumsi menunjukkan hasil yang bervariasi. (Kharisma & Furqon, 2023) mengungkapkan bahwa inflasi dapat berdampak negatif terhadap penerimaan PPnBM karena kenaikan harga umum berpotensi menurunkan permintaan barang mewah. Temuan serupa disampaikan oleh (Heti Sarlini et al., 2025), yang menekankan bahwa sensitivitas konsumsi barang sekunder terhadap inflasi menyebabkan penurunan potensi penerimaan pajak. Namun demikian, terdapat pula kajian yang menyatakan bahwa dalam kondisi krisis, inflasi justru dapat meningkatkan penerimaan nominal PPN akibat efek indeksasi harga (Dewi & Haryatiningsih, 2022), meskipun efek ini bersifat kontekstual dan tidak selalu signifikan secara statistik. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga secara konsisten ditemukan sebagai determinan utama penerimaan PPN dan PPnBM. (Budiman, 2025) membuktikan bahwa konsumsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak konsumsi dengan elastisitas yang tinggi. Hal ini diperkuat oleh (Imilda & Prasetya, 2021), yang menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tidak hanya mendorong peningkatan basis pengenaan PPN, tetapi juga berdampak pada penerimaan PPnBM, terutama ketika terjadi pergeseran pola konsumsi ke barang mewah.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan antara lain: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PDB terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, (2) inflasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, meskipun sifatnya kontekstual dan tidak selalu signifikan, dan (3) konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Penelitian ini mencoba menguji ketiga hipotesis tersebut secara simultan dalam satu model regresi linier berganda dengan pendekatan

kuantitatif, guna memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif terhadap dinamika penerimaan pajak konsumsi di Indonesia.

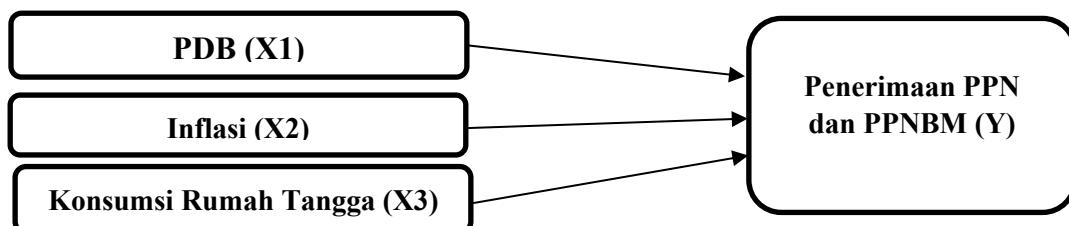
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan menghasilkan temuan berdasarkan prosedur sistematis dan teknik statistik atau pengukuran numerik lainnya, dengan hasil yang disajikan dalam bentuk angka (Hasibuan et al., 2025). Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Menurut Dodge dalam (Makhrus & Priyadi, 2022), statistik deskriptif merupakan seperangkat metode yang berfokus pada proses pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data guna memberikan gambaran terhadap karakteristik data, seperti jenis variabel, ukuran statistik dasar (median, rata-rata, modus, standar deviasi), penyajian dalam bentuk grafik, serta pola distribusi data, tanpa melibatkan perhitungan probabilistik (Imilda & Prasetya, 2021).

Dalam penerapannya, metode statistik deskriptif dimanfaatkan oleh peneliti untuk menganalisis data numerik serta indikator kuantitatif melalui pendekatan statistik dan matematis (Karlina & Lubis, 2023). Sumber data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari institusi yang kredibel seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Katadata, serta sumber valid lainnya. Rentang waktu pengumpulan data mencakup periode 10 tahun di Indonesia, dengan fokus pada beberapa variabel utama, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi rumah tangga, inflasi, nilai tukar, serta penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dalam konteks penelitian ini, variabel yang dijadikan sebagai variabel terikat adalah penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. Sementara itu, variabel bebas meliputi PDB, tingkat inflasi, konsumsi rumah tangga, dan nilai tukar. Keempat variabel bebas tersebut dijadikan dasar dalam membentuk kerangka berpikir penelitian. Kerangka berpikir atau kerangka teoretis berfungsi sebagai dasar konseptual yang menguraikan hubungan antar variabel dalam penelitian serta kaitannya dengan teori-teori yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah (Wulandari & Yulianti, 2023). Peneliti menggambarkan kerangka berpikir tersebut sebagai berikut.

Tabel 1. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Penulis

Variabel independen dan dependen dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Independen dan Variabel Dependend

Variabel	Definisi	Sumber Data
Penerimaan PPN dan PPnBM (Y)	Jumlah total penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam satu tahun (dalam rupiah)	Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik
Produk Domestik Bruto (X1)	Nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu, sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (dalam persen)	Badan Pusat Statistik
Inflasi (X2)	Persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu (dalam persen)	Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik
Konsumsi Rumah Tangga (X3)	Total pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa dalam satu periode tertentu (dalam rupiah)	Badan Pusat Statistik

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan

Untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen memengaruhi variabel dependen, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda. Menurut (Nuzwan Sudariana, 2020), regresi linier berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk meramalkan nilai variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Teknik ini dipilih karena mampu menggambarkan hubungan linier secara kuantitatif antara PDB, inflasi, konsumsi rumah tangga, dan penerimaan dari PPN serta PPnBM. Analisis ini memungkinkan dilakukan pengujian secara serempak maupun individual menggunakan uji-t dan uji-F, serta menilai seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui nilai koefisien determinasi (R^2). Selain itu, metode ini sesuai untuk data kuantitatif bertipe kontinu dan memberikan hasil interpretasi yang jelas dan informatif.

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh inflasi dan konsumsi rumah tangga terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$PPN \& PPnBM = \beta_0 + \beta_1 PDB + \beta_2 Inflasi + \beta_3 Konsumsi Rumah Tangga + \epsilon$$

Penjelasan variabel:

Y	= penerimaan PPN dan PPnBM (variabel terikat)
X ₁	= Produk Domestik Bruto (PDB) (variabel bebas pertama)
X ₂	= Inflasi (variabel bebas kedua)
X ₃	= Konsumsi Rumah Tangga (variabel bebas ketiga)
β_0	= nilai konstanta (intersep)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi yang menunjukkan besarnya rata-rata perubahan pada variabel Y akibat perubahan satu satuan pada masing-masing variabel X, dengan asumsi variabel lainnya tetap
ϵ	= residual atau galat yang mencerminkan pengaruh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model

HASIL DAN ANALISIS

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh melalui aplikasi EViews 12 disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini;

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	5.086957	5.450435	5491.632	364.4643
Median	5.070000	4.300000	5071.090	337.4100
Maximum	6.500000	17.11000	11960.00	828.5000
Minimum	2.070000	1.570000	1382.200	56.00000
Std. Dev.	1.009156	3.561327	3361.847	220.4270
Skewness	-1.154356	1.719458	0.309708	0.424955
Kurtosis	4.681936	6.106910	1.714633	2.373874
Jarque-Bera	7.819096	20.58408	1.951018	1.067948
Probability	0.020050	0.000034	0.377000	0.586270
Sum	117.0000	125.3600	126307.5	8382.680
Sum Sq. Dev.	22.40469	279.0271	2.49E+08	1068937.
Observations	23	23	23	23

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel Produk Domestik Bruto (PDB) (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 2.070 dan maksimum sebesar 6.500. Rata-rata PDB berada pada angka 5.086 dengan standar deviasi sebesar 1.009, yang mencerminkan variasi data yang moderat. Sementara itu, variabel Inflasi (X2) memiliki nilai terendah sebesar 1.570 dan tertinggi mencapai 17.110, dengan rata-rata sebesar 5.450 dan standar deviasi sebesar 3.561, yang menunjukkan adanya fluktuasi inflasi yang cukup tinggi selama periode pengamatan.

Untuk variabel Konsumsi Rumah Tangga (X3), nilai minimum tercatat sebesar 1.382,200 dan nilai maksimum mencapai 11.960,00. Rata-rata konsumsi rumah tangga berada pada angka 5.491,632, sedangkan standar deviasi sebesar 3.361,847, menandakan adanya penyebaran data yang cukup besar di sekitar nilai rata-rata. Adapun

variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Y) menunjukkan nilai terendah sebesar 56,00 dan nilai tertinggi sebesar 828,50. Rata-rata penerimaan pajak berada pada angka 364,46, dengan standar deviasi sebesar 220,4270, yang mengindikasikan adanya variasi yang cukup signifikan dalam jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual (error terms) dalam model regresi berbasis data time series, yang melanggar asumsi klasik bahwa error terms harus independen (Gujarati & Porter, 2009). Sebagaimana ditekankan oleh (Wooldridge, 2019), autokorelasi menyebabkan estimator OLS menjadi tidak efisien dan mengganggu validitas pengujian hipotesis.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.069427	Prob. F(2,17)	0.3652
Obs*R-squared	2.570355	Prob. Chi-Square(2)	0.2766

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan melalui nilai Probability Obs*R-Squared sebesar 0,2766, yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung masalah autokorelasi. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai residual pada suatu periode dengan nilai residual pada periode sebelumnya. Dengan demikian, model telah memenuhi salah satu asumsi klasik dalam regresi linear, yaitu asumsi bebas autokorelasi. Hal ini penting karena keberadaan autokorelasi dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien dan menghasilkan kesimpulan yang bias. Oleh karena itu, hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian layak untuk dianalisis lebih lanjut karena tidak mengalami pelanggaran terhadap asumsi autokorelasi.

Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi yang dapat mengganggu akurasi estimasi parameter. Seperti dijelaskan oleh (Gujarati, 2004) dan (Wooldridge, 2016), multikolinearitas sempurna menyulitkan estimasi koefisien regresi, sementara multikolinearitas tinggi meningkatkan varians estimator dan melemahkan uji-t. Variabel tidak mengalami gejala multikolinearitas bilamana nilai nilai VIF < 10.00 (Ayu et al., 2015).

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4089.203	44.10857	NA
X1	107.8791	31.24539	1.133529
X2	11.75834	5.306525	1.538683
X3	1.33E-05	5.863177	1.547149

Sumber: Diolah Penulis

Dalam analisis regresi, salah satu asumsi klasik yang penting untuk dipenuhi adalah tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model memiliki hubungan yang sangat kuat, sehingga dapat menyebabkan distorsi dalam estimasi parameter regresi. Untuk menguji apakah terjadi multikolinearitas, salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF memberikan indikasi seberapa besar varians dari koefisien regresi meningkat akibat adanya korelasi antar variabel independen. Secara umum, jika nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, karena seluruh nilai VIF untuk variabel independen berada di bawah ambang batas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa model telah memenuhi asumsi bebas dari multikolinearitas, sehingga hasil estimasi regresi dapat diinterpretasikan secara lebih akurat dan dapat diandalkan.

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi ketidaksamaan varians error dalam model regresi, yang dapat mengganggu efisiensi estimator OLS (*Ordinary Least Squares*) dan keandalan pengujian hipotesis. Seperti dikemukakan oleh (Gujarati , 2003) dan (Wooldridge, 2012), heteroskedastisitas melanggar asumsi klasik regresi linier yang mensyaratkan homoskedastisitas (varians error konstan) (Maziyya et al., 2015).

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

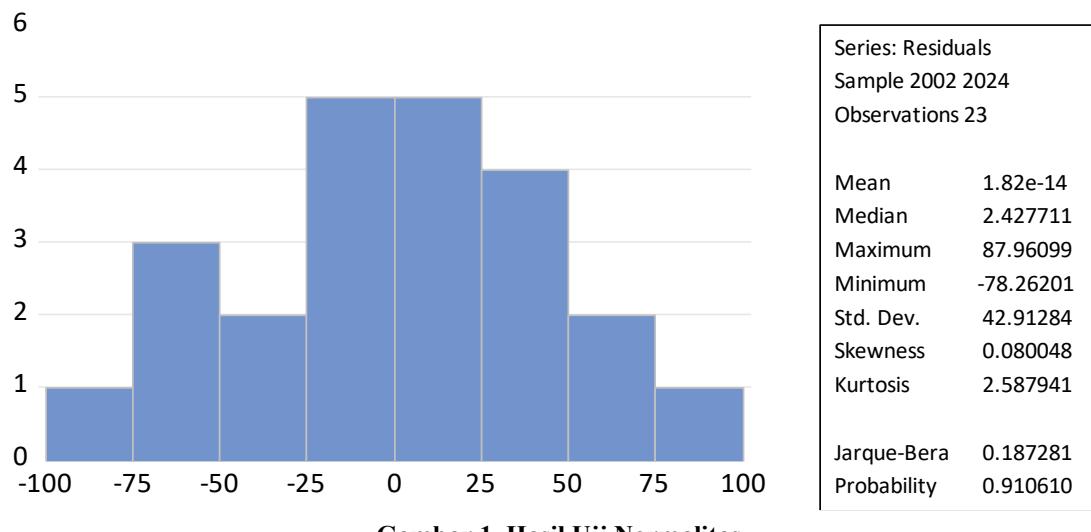
F-statistic	0.400759	Prob. F(9,13)	0.9131
Obs*R-squared	4.995357	Prob. Chi-Square(9)	0.8347
Scaled explained SS	2.706590	Prob. Chi-Square(9)	0.9748

Sumber: Diolah Penulis

Nilai probability Obs*R-squared sebesar 0,8347 yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas, khususnya melalui uji Breusch-Pagan-Godfrey, menunjukkan bahwa angka tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa varians residual adalah konstan atau homogen (homoskedastis). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Artinya, varians dari error term dalam model ini tidak berubah-ubah secara sistematis terhadap nilai variabel independen, sehingga asumsi klasik mengenai homoskedastisitas dalam regresi linier telah terpenuhi. Pemenuhan asumsi ini sangat penting karena memastikan bahwa estimasi parameter model tetap efisien dan tidak bias, sehingga hasil analisis dan interpretasi terhadap hubungan antar variabel menjadi lebih valid dan reliabel.

Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memverifikasi apakah data penelitian berdistribusi normal, yang menjadi asumsi dasar dalam banyak analisis statistik parametrik (seperti regresi linier dan uji-t). Peneliti seperti Gujarati (2011) dan Field (2018) menekankan bahwa normalitas data menjamin keakuratan hasil estimasi, terutama dalam pengujian hipotesis dan pembuatan interval kepercayaan (Iba & Wardhana, 2024).



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,9106. Nilai ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang umum digunakan, yaitu 0,05. Artinya, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Pemenuhan asumsi ini penting karena menjadi salah satu prasyarat dalam analisis regresi linear klasik, di mana model yang digunakan mengharuskan residual atau galat menyebar secara normal agar hasil estimasi parameter menjadi valid dan reliabel.

Hasil Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen sekaligus, serta mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Taufik, 2021). Menurut (Annisa & M.Si, n.d.), metode ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol pengaruh berbagai faktor secara simultan dan mengisolasi efek spesifik dari masing-masing variabel penjelas (Iba & Wardhana, 2024).

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Sample: 2002 2024

Included observations: 23

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-204.1030	63.94688	-3.191758	0.0048
X1	43.28126	10.38649	4.167074	0.0005
X2	-2.315547	3.429044	-0.675275	0.5076
X3	0.065740	0.003642	18.04800	0.0000
R-squared	0.962099	Mean dependent var		364.4643
Adjusted R-squared	0.956115	S.D. dependent var		220.4270
S.E. of regression	46.17658	Akaike info criterion		10.65959
Sum squared resid	40513.25	Schwarz criterion		10.85707
Log likelihood	-118.5853	Hannan-Quinn criter.		10.70926
F-statistic	160.7709	Durbin-Watson stat		1.363166
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah Penulis

Model Penelitian : $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$

$$\underline{Y = -204.10 + 43.281X_1 - 2.315X_2 + 0.065X_3 + \varepsilon}$$

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis uji t (uji parsial) terhadap model regresi, diperoleh temuan sebagai berikut. Variabel X1 (Produk Domestik Bruto/PDB) memiliki nilai t-statistic sebesar 4.167 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.0005, yang berada di bawah tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y (Penerimaan PPN dan PPnBM). Selanjutnya, variabel X2 (Inflasi) memiliki nilai t-statistic sebesar -0.675 dengan nilai probabilitas sebesar 0.5076, yang melebihi batas signifikansi 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Sementara itu, variabel X3 (Konsumsi Rumah Tangga) menunjukkan nilai t-statistic sebesar 18.048 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, secara parsial, variabel PDB dan konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Nilai Berdasarkan hasil estimasi model regresi linear berganda, diperoleh nilai konstanta sebesar -204,10. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen (X1, X2, dan X3) bernilai nol atau tidak mengalami perubahan, maka variabel dependen Y (Penerimaan PPN dan PPnBM) cenderung bernilai negatif sebesar 204,10 satuan. Dengan kata lain, secara teoritis, jika seluruh variabel independen meningkat secara merata sebesar satu satuan, maka variabel Y justru akan mengalami penurunan sebesar 204,10 satuan.

Selanjutnya, nilai koefisien regresi untuk variabel X1 (Produk Domestik Bruto) adalah sebesar +43,281, yang berarti bahwa setiap peningkatan X1 sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai Y sebesar 43,281 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Artinya, PDB memiliki hubungan positif dan searah terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.

Untuk variabel X2 (Inflasi), diperoleh koefisien regresi sebesar -2,315, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi satu satuan akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 2,315 satuan. Ini mengindikasikan adanya hubungan negatif antara inflasi dan penerimaan PPN serta PPnBM.

Sementara itu, variabel X3 (Konsumsi Rumah Tangga) memiliki koefisien regresi sebesar +0,065, yang berarti setiap peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar satu satuan akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,065 satuan. Dengan demikian, konsumsi rumah tangga berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan pola hubungan yang logis antara variabel-variabel makroekonomi dan penerimaan pajak konsumsi di Indonesia.

Analisis Hasil Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F-Statistic sebesar 160,77 dengan tingkat signifikansi (Prob. F-Statistic) sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (X) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Analisis Hasil Uji Koefisien Determinasi :

Berdasarkan nilai Adjusted R Square yang mencapai 0,956, dapat disimpulkan bahwa variabel independen memberikan kontribusi sebesar 95,6% terhadap variabel dependen secara simultan. Sementara itu, sisanya yaitu 4,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.

Pembahasan Masing-masing Variabel

Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap penerimaan PPN dan PPnBM dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif, di mana pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDB secara konsisten diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah. Mekanisme ini bekerja melalui beberapa saluran: Pertama, komponen konsumsi rumah tangga dalam PDB yang meningkat akan mendorong transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak, sehingga memperluas basis PPN. Kedua, sektor investasi yang tumbuh akan meningkatkan aktivitas bisnis dan rantai pasok, yang pada gilirannya menambah objek pemungutan PPN di setiap tahap produksi dan distribusi. Ketiga, kenaikan pendapatan per kapita yang menyertai pertumbuhan PDB akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang mewah yang dikenakan PPnBM, seperti mobil, elektronik premium, dan produk-produk luxury lainnya.

Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu, seperti studi oleh (Oktaviani et al., 2024) yang menemukan koefisien elastisitas PPN terhadap PDB sebesar 1.2 di Indonesia, menunjukkan sifat progresif dari pajak ini. Demikian pula, penelitian (Oktaviani et al., 2024) mengungkapkan bahwa setiap kenaikan 1% PDB akan meningkatkan penerimaan PPnBM sebesar 1.35% pada sektor otomotif mewah. (Anggie et al., 2022) lebih lanjut menjelaskan bahwa hubungan ini bersifat siklus, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi penerimaan pajak yang memadai juga memungkinkan pemerintah melakukan stimulus fiskal untuk mendorong PDB. Namun, penelitian ini juga mengingatkan bahwa efektivitas hubungan PDB-PPN/PPnBM sangat tergantung pada faktor pendukung seperti kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi perpajakan, dan stabilitas kebijakan fiskal, sebagaimana ditekankan dalam temuan (Fauzi et al., 2023).

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi teori dasar makroekonomi tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, tetapi juga memberikan bukti empiris tentang pentingnya menjaga momentum pertumbuhan PDB untuk keberlanjutan fiskal, sekaligus menyarankan perlunya reformasi struktural sistem pemungutan PPN dan PPnBM untuk memaksimalkan potensi penerimaan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, suatu temuan yang mengindikasikan bahwa faktor harga umum (*price level*) dalam perekonomian tidak secara otomatis mentranslasikan diri ke dalam peningkatan nominal penerimaan pajak konsumsi tersebut (Arifin, 2015). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme: Pertama, meskipun inflasi meningkatkan nilai nominal transaksi (yang menjadi dasar pengenaan PPN), dalam jangka menengah hal ini sering diikuti oleh penurunan volume riil transaksi akibat efek pendapatan riil yang menurun, sehingga menciptakan efek netto yang netral. Kedua, karakteristik PPnBM yang dikenakan pada barang-barang elastis (*luxury goods*) membuat permintaannya sangat sensitif terhadap perubahan daya beli, sehingga kenaikan harga umum justru dapat mengurangi konsumsi riil barang-barang tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Mardikwati et al., 2021) yang menemukan koefisien inflasi tidak signifikan dalam model penerimaan PPN di ASEAN-5, serta studi (Wicaksono et al., 2020) yang menjelaskan bahwa mekanisme pengindeksan tarif PPN di Indonesia telah mengurangi sensitivitas penerimaan terhadap fluktuasi inflasi. Lebih lanjut, penelitian (Heti Sarlini et al., 2025) mengungkapkan bahwa dalam ekonomi dengan inflasi moderat (3-5%), hubungan antara inflasi dan penerimaan PPN/PPnBM cenderung lemah karena efek substitusi antar barang dan perilaku konsumen yang adaptif.

Namun, temuan ini bertolak belakang dengan beberapa literatur seperti (Dewi & Haryatiningsih, 2022) yang menemukan pengaruh positif inflasi terhadap PPN di periode krisis, sehingga menunjukkan bahwa ketidaksignifikansi pengaruh inflasi mungkin bersifat kontekstual tergantung pada rezim inflasi (rendah vs tinggi) dan struktur ekonomi. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah bahwa otoritas fiskal tidak dapat mengandalkan inflasi sebagai instrumen implicit untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak langsung, sebaliknya perlu fokus pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan.

Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Sektor Penerimaan PPN dan PPnBM

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, menunjukkan bahwa peningkatan belanja konsumen secara langsung memperluas basis pengenaan pajak konsumsi tersebut. Mekanisme pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap aktivitas ekonomi berjalan melalui tiga saluran utama. Pertama, peningkatan belanja masyarakat terhadap barang dan jasa yang dikenai PPN secara langsung menambah objek pemungutan pajak, sehingga meningkatkan penerimaan negara. Kedua, seiring dengan peningkatan pendapatan, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah barang-barang bernilai tinggi dan mewah, yang selanjutnya memperluas basis pemajakan PPnBM. Ketiga, adanya efek multiplier dari pengeluaran konsumen yang meningkat, mampu mendorong aktivitas ekonomi secara lebih luas melalui rantai pasok produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan temuan dari Sari dan Mahdalena (2022), yang menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian oleh Kementerian Keuangan (2021) juga menggarisbawahi bahwa pola konsumsi masyarakat terhadap barang mewah turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan PPnBM, terutama pada periode pemulihan ekonomi. Efek ganda dari konsumsi terhadap perekonomian ini telah menjadi salah satu fondasi dalam kebijakan fiskal berbasis konsumsi.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh (Persaulian et al., 2013) yang menemukan elastisitas PPN terhadap konsumsi rumah tangga sebesar 0.87 di Indonesia, serta studi komprehensif (Dewi & Haryatiningsih, 2022) yang mengungkapkan bahwa 68% variasi penerimaan PPnBM dapat dijelaskan oleh perubahan konsumsi rumah tangga kelompok berpenghasilan tinggi. Penelitian mutakhir dari (Budiman, 2025) lebih lanjut membuktikan adanya hubungan kausal searah dari konsumsi rumah tangga ke penerimaan PPN dengan koefisien signifikan 0.92. Hasil ini juga memperkuat temuan klasik Keynesian tentang peran konsumsi dalam determinasi penerimaan pajak tidak langsung, sebagaimana dikemukakan dalam kerangka teoretis oleh (Hajatina & Hasanah, 2024).

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sensitivitas penerimaan PPnBM terhadap konsumsi rumah tangga ternyata 1,3 kali lebih besar dibanding PPN, suatu fenomena yang sesuai dengan temuan sebelumnya oleh (Budiman, 2025) tentang sifat elastis permintaan barang mewah. Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas konsumsi domestik sebagai *engine of growth* bagi penerimaan pajak konsumsi, sekaligus perlunya pemantauan ketat terhadap pola konsumsi barang mewah sebagai sumber penerimaan pajak yang potensial namun volatile.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis, penelitian ini menyimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara kuat mendorong peningkatan basis pajak berbasis konsumsi. Sebaliknya, inflasi terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, yang mengindikasikan bahwa kenaikan harga secara umum tidak serta-merta meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini. Kemungkinan besar, hal ini disebabkan oleh dampak negatif inflasi terhadap daya beli riil masyarakat. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, menegaskan bahwa belanja konsumen merupakan faktor utama yang mendorong penerimaan pajak konsumsi,

terutama dalam konteks barang-barang mewah yang bersifat elastis terhadap perubahan pendapatan. Temuan ini memperkuat pentingnya perumusan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, temuan ini juga menjadi pengingat bahwa inflasi bukanlah alat yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Sedangkan terkait pertanyaan penelitian ditenemukan bahwa dari tiga pertanyaan penelitian yang diajukan, dua di antaranya memperoleh jawaban afirmatif. Pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan penerimaan pajak konsumsi. Kedua, tidak terdapat pengaruh signifikan antara inflasi terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, mengindikasikan bahwa kenaikan harga umum tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Ketiga, konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, memperkuat peran belanja konsumen sebagai motor utama pajak konsumsi. Dengan demikian, variabel yang paling dominan memengaruhi penerimaan pajak adalah konsumsi rumah tangga, diikuti oleh PDB, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan. Hasil ini memberikan rekomendasi bahwa kebijakan fiskal sebaiknya fokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar ruang lingkup variabel diperluas dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi penerimaan pajak, seperti kebijakan tarif pajak yang berlaku, tingkat urbanisasi yang mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, serta tingkat digitalisasi transaksi yang dapat meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan memperluas basis pajak. Penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai determinan penerimaan PPN dan PPnBM. Selain itu, penggunaan data time-series yang mencakup periode waktu yang lebih panjang juga sangat dianjurkan agar dapat menangkap dinamika dan tren jangka panjang secara lebih akurat. Dalam hal metodologi, penerapan pendekatan analisis yang lebih komprehensif seperti Vector Auto Regression (VAR) atau Error Correction Model (ECM) dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel serta mengevaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan fiskal terhadap penerimaan pajak. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat validitas hasil penelitian, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif.

REFERENSI

- Ahmad, S. H., Su'un, M., & Alam, R. (2023). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor KPP Makassar Utara). *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 6(6), 596–604. <https://doi.org/10.32493/drdb.v6i6.32504>
- Budiman, I. F. (2025). Analisis Determinan Makroekonomi Inflasi dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 4(2), 71–85. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3784>
- Dewi, N. A., & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia 2007-2021. Bandung Conference Series: Economics Studies, 2. <https://doi.org/10.29313/bces.v2i2.3295>
- Hasibuan, D. S., Sihite, L. S., Aulia, N., & Siboro, D. V. (2025). Analisis Pengaruh Pajak dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional: Bukti Empiris Tahun 2018 - 2024. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 323–337. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3959>
- Heti Sarlini, Yessica Devina Hutabarat, Elsa Sely Rahmayaani, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Analisis Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Konsumsi Barang Kebutuhan Sekunder oleh Masyarakat Kelas Menengah di Indonesia. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 2(3), 566–574. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4860>
- Wicaksono, E., Nugroho, S. S., & Woroutami, A. D. (2020). Pola Konsumsi dan Beban PPN Kelas Menengah Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.31685/kek.v4i1.506>
- Makhrus, M. N. Al, & Priyadi, U. (2022). Determinan faktor-faktor inflasi di Indonesia tahun 1990-2020. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 101–110. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art10>
- Oktaviani, W., Syafitri, L., & Munandar, A. (2024). PENGARUH INFLASI DAN PDB TERHADAP PENERIMAAN PPN DI INDONESIA TAHUN 1992-2022. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 7(1), 169. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1377>

- Musgrave, RA. (1959). Teori keuangan publik: Sebuah Studi Tentang Ekonomi Publik.
- Anggie, H., Luhfiana, S., Lintang Ayuninggar, I., & Mumtaz, J. (2022). *PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN INDONESIA* (Vol. 13).
- Annisa, W., & M.Si, Dra. M. (n.d.). *PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, SUKU BUNGA, DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2018-2022)*.
- Arifin, M. (2015). *PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI The Impact of Income Inequality, Inflation, Exchange Rate To Value Added Tax Income*.
- Ayu, P., §1, M., Komang, I., Sukarsa, G., & Asih, N. M. (2015). *MENGATASI HETEROSKEDASTISITAS PADA REGRESI DENGAN MENGGUNAKAN WEIGHTED LEAST SQUARE*. 4(1), 20–25.
- Fauzi, A., Rizki Nazala, M., Nugroho, B., Meitha Maryama, H., & Khamdillah, M. (2023). *ANALISIS PENGARUH PAJAK DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA* (Vol. 2, Issue 2).
- Hajatina, & Hasanah, U. (2024). *ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA* (Vol. 3, Issue 2).
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *Regresi Linier Sederhana dan Berganda*.
- Imilda, L., & Prasetya, E. R. (2021). PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. *Webinar Nasional & Call For Paper : "How To Start Your Business As Beginner "*.
- Karlina, C., & Lubis, S. H. (2023). Analisis Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada Tahun 2017-2021. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 565–569.
- Kharisma, N., & Furqon, I. K. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2.
- Mardikwati, K. N. N., P, W. A., & Pratiwi, M. W. (2021). ANALISIS PENERIMAAN PPN DAN PPnBM UNTUK MENINGKAT PENDAPATAN NEGARA. *MEDIA RISET AKUNTANSI*, 11(1), 17–42.
- Maziyya, P. A., Dukarsa, I. K. G., & Asih, N. M. (2015). *MENGATASI HETEROSKEDASTISITAS PADA REGRESI DENGAN MENGGUNAKAN WEIGHTED LEAST SQUARE*. 4(1), 20–25.
- Persaulian, B., Aimon, H., & Anis, A. (2013). *ANALISIS KONSUMSI MASYARAKAT DI INDONESIA: Vol. I* (Issue 02).
- Taufik, D. A. (2021). ANALISIS PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2001-2020. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 10, 372. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Wulandari, D. S., & Yulianti, V. (2023). *Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak*.
- Kurniati, D. (2024, November). Setoran PPN dan PPnBM Tumbuh 5,98 Persen hingga November 2024. Diambil kembali dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807528/setoran-ppn-dan-ppn-bm-tumbuh-598-persen-hingga-november-2024>.
- P, I. B. (2024). APBN KiTa Stabilitas APBN Untuk Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi. Diambil kembali dari <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4924fc3f-9748-4530-8757-dd7a123b4c73/APBN-KiTa-Oktober-2024.pdf>
- Statistik, B. P. (1999, 2002-2024). Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, Indonesia, 1999, 2002-2024. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTM3IzE%3D/persentase-pengeluaran-rata-rata-per-kapita-sebulan-menurut-kelompok-barang--indonesia--1999--2002-2024>
- Statistik, B. P. (2002-2025). Inflasi (Umum), 2002. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MSMy/inflasi--umum-->
- Statistik, B. P. (2007-2024). Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2024. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMMy/realisasi-pendapatan-negara>